

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

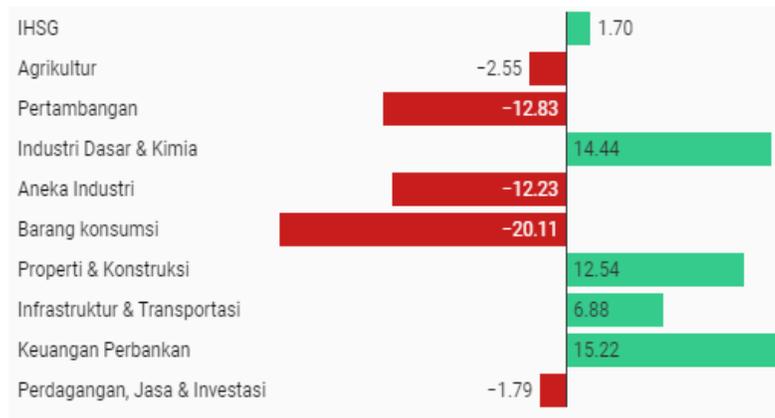
Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) adalah pihak penyelenggara dan penyedia sistem, serta sarana jual dan beli efek. Bursa Efek Indonesia terdapat 3 perusahaan yang diklasifikasikan menjadi sektor utama, sektor manufaktur, dan sektor jasa. Sektor jasa dibagi menjadi 4 sektor yaitu sektor *property, real estate, & building construction*; sektor infrastruktur, utilitas, & transportasi; sektor keuangan; dan sektor perdagangan, jasa, & investasi (Kayo, 2016). Dari berbagai jenis sektor yang telah diklasifikasikan penelitian ini akan menggunakan objek penelitian sub sektor asuransi yang termasuk kedalam sektor keuangan.

Sektor keuangan merupakan kelompok perusahaan publik industri jasa yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor keuangan terbagi menjadi beberapa sub sektor, di antaranya sub sektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi dan sub sektor lainnya yang merupakan perusahaan penghasil bahan baku (Kayo, 2016).

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menyediakan jasa dan alat untuk mengurangi suatu resiko agar kemungkinan terjadinya kerugian dapat diprediksi dan akan dibagi oleh semua pihak yang terbaik secara proposional (Sunyoto & Putri, 2017:98). Asuransi merupakan jaminan dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerugian-kerugian tertentu bagi pemakai jasa asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas pentingnya perlindungan berbagai resiko di masa depan yang tidak dapat diprediksi oleh waktu dan peristiwa yang mungkin akan terjadi.

Kinerja indeks saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berbeda-beda selama kurun waktu 2019, tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS) yang tumbuh sebesar 1,7% sepanjang tahun. Berdasarkan Gambar 1.1 Kinerja Indeks

Sektoral Tahun 2019 mencatat dimana indeks sektor keuangan menjadi juara indeks sektoral dengan nilai keunggulan sebesar 15,22% (Muamar, 2020).



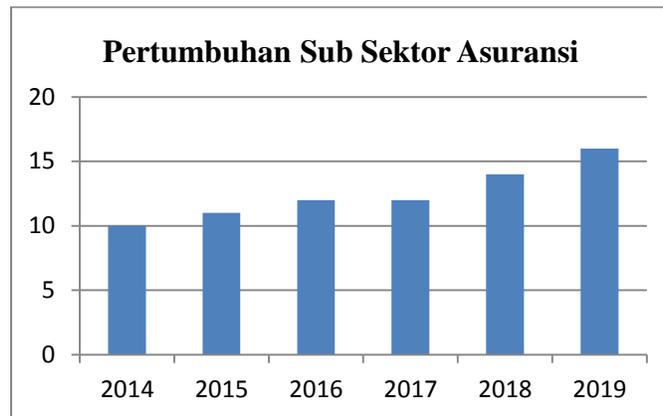
Gambar 1.1 Kinerja Indeks Sektorial Tahun 2019

Sumber: www.cnbcindonesia.com (2020)

Jannah (2017) berpendapat bahwa jasa keuangan pada tahun 2016 menjadi sektor pertumbuhan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor jasa dan keuangan tumbuh sebesar 8,9% atau nilai tertinggi dibandingkan dengan sektor jasa lainnya. Ekonomi Indef Eko Listiyanti menyatakan bahwa kontribusi sektor jasa keuangan terus mengalami peningkatan bagi perekonomian. Bahkan, porsi industri jasa keuangan khususnya perbankan dan asuransi pada ekonomi terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Secara umum, sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi sebesar 4,20% pada tahun 2016. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan kontribusinya sebesar 4,03% di tahun 2015 dan 3,86% di tahun 2014. Pertumbuhan sektor ini pun meningkat karena pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai nilai tertinggi di 2016, yaitu sebesar 8,9% yoy.

Sicca (2019) menyatakan bahwa menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4%. Wimboh mengatakan sejumlah capaian industri jasa keuangan merupakan modal yang penting untuk meningkatkan perannya sebagai motor

pergerakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 ini, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa juga berada di level tinggi yaitu 310% dan 429%. Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level tertinggi. *Capital Adequacy Ratio* perbankan sebesar 22,54%. Sejalan dengan itu, *Risk-Based Capital* Industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 313% dan 641% jauh diatas ambang batas ketentuan (Sitanggang, 2019).



Gambar 1.2 Pertumbuhan Sub Sektor Asuransi Tahun 2014-2019

Sumber: www.idx.co.id dan data diolah oleh penulis (2020)

Berdasarkan Gambar 1.2 Pertumbuhan Sub Sektor Asuransi Tahun 2014-2019 terus mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya perusahaan asuransi di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 perusahaan asuransi meningkat sebesar 16 perusahaan, hal ini menjelaskan bahwa semakin berkembangnya era globalisasi dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan berbagai resiko. Hal tersebut yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan perusahaan sub sektor asuransi sebagai objek penelitian dan mengaitkan dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan sub sektor asuransi telah menyajikan laporan keuangan dan menunjukkan kondisi keuangan yang sesungguhnya tanpa ada yang disembunyikan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan antara manajemen perusahaan (pihak internal) dan investor (pihak eksternal) mengenai gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai salah satu sumber informasi untuk menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dibuat dengan benar, terbebas dari salah saji material, dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Informasi yang sesuai akan berguna bagi pihak internal perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajer perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga dibutuhkan oleh pihak eksternal, seperti sebagai dasar perhitungan pajak bagi pemerintah, sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit bagi kreditor, dan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan bagi investor (Susanti et al., 2019).

Integritas adalah prinsip moral yang menunjukkan sikap tidak memihak dan jujur. Seseorang yang memiliki integritas tinggi akan memandang fakta apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya (Mulyadi, 2011:46). *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan adalah suatu kondisi yang menyajikan informasi laporan keuangan dengan wajar dan tidak bias, serta menyajikan apa yang dimaksudkan untuk diungkapkan secara jujur. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pengguna dan memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibagi menjadi dua, yaitu kualitas utama yang terdiri dari *relevance* dan *faithful representation*, serta kualitas pendukung yang terdiri dari *comparability*, *verifiability*, *timeliness* dan *understandable* (Nicolin & Sabeni, 2013).

Perkembangan dunia yang tidak menentu mendorong semakin banyaknya skandal manipulasi akuntansi yang melibatkan perusahaan. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi, sehingga dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi dapat diukur dengan menggunakan prinsip konservatisme.

Menurut Savitri (2016) konservatisme adalah reaksi kehati-hatian (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis telah cukup dipertimbangkan. Prinsip konservatisme merupakan konsep yang berdasarkan atas ketidakpastian hasil, seperti beban dan kewajiban yang harus sesegera mungkin diakui, meskipun hasilnya tidak dapat dipastikan. Konservatisme menetapkan kemungkinan kesalahan dalam pengukuran yang memungkinkan adanya *understatement* dibanding *overstatement* dalam laba bersih dan total akitva. Tingkat konservatisme akuntansi setiap perusahaan memiliki hasil yang berbeda, hal ini yang menyebabkan kebutuhan dari setiap perusahaan memiliki perbedaan. Penetapan tingkat konservatisme yang besar akan dipilih manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik (Reskino & Vemiliyarni, 2016).

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*) yang berarti timbul pengorbanan yang berasal dari hubungan keagenan, termasuk hubungan dalam kontrak kerja antara manajer perusahaan dan pemegang saham (Sulistyanto, 2013:119). Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak, yakni pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) (Santia, 2019). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Santoso (2016) menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*), serta antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Manajer dapat bertindak *opportunistic* yang menunjukkan sifat dasar manusia, seperti kepentingan organisasi yang tidak diutamakan lebih dari kepentingan pribadinya. Teori agensi juga menjelaskan bahwa tepatnya mekanisme pengawasan akan mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi yang terjadi (Putra, 2012) dalam (Ayem & Yuliana, 2019).

Di Indonesia pada saat ini terjadi berbagai kasus manipulasi laporan keuangan karena rendahnya integritas laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak menunjukkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Seperti yang

terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya Tbk melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan berupa angka, data, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan kronologi permasalahan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Tbk. Berawal pada tahun 2004, cadangan yang dilaporkan oleh perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya bahwa risiko pailit mencapai Rp 2,76 triliun. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga memberikan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan pada tahun 2006-2007 karena laporan keuangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Audit BPK tahun 2015 menunjukkan adanya dugaan wewenang jiwasraya yang disalahgunakan dan laporan aset investasi keuangan yang melebihi realita (*overstated*), serta kewajiban yang di bawah realita (*understated*). Pada tahun 2017 PT Asuransi Jiwasraya Tbk laporan keuangan tampak lebih baik dengan raih pendapatan premi produk JS Saving Plan mencapai Rp 21 triliun.

Indikasi kejanggalan itu benar karena hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) *Price Waterhouse Coopers* (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim yang memperoleh laba Rp428 miliar, padahal sebelumnya laba yang diperoleh sebesar Rp2,4 triliun. Pada Oktober-November 2018, publik mengetahui ketidakmampuan jiwasraya dalam membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar kepada nasabah JS Saving Plan yang menimbulkan tekanan likuiditas. Manajemen baru Jiwasraya yang dipimpin oleh Asmawi Syam melihat adanya permasalahan pada produk JS Saving Plan dan melihat ada permasalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Setelah dilakukan audit, laba bersih yang tercatat pada laporan keuangan tahun 2018 adalah Rp 2,4 triliun namun pada kenyataannya laba bersih yang ada hanya sebesar Rp 360 miliar, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya Tbk telah melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*) dengan mengakui laba namun sebenarnya laba itu adalah laba semu. Laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebut bahwa PT Asuransi Jiwasraya Tbk investasi yang dilakukan banyak diberikan kepada aset berisiko untuk

mengejar imbal hasil yang tinggi, sehingga prinsip kehati-hatian diabaikan (Makhl, 2019).

Kegagalan integritas laporan keuangan ditandai dengan munculnya fenomena manipulasi laporan keuangan, terutama untuk analis keuangan, kreditor, dan investor. Adanya masalah yang dialami PT Asuransi Jiwasraya Tbk membuktikan bahwa kurangnya integritas dalam menyajikan informasi dan data yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dengan kondisi tersebut mengurangi rasa kepercayaan untuk para pengguna laporan keuangan. PT Asuransi Jiwasraya Tbk kurang memperhatikan pergantian jangka waktu audit (*audit tenure*) sehingga auditor dianggap tidak mampu untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya. Kepemilikan institusional dan komisaris independen juga dapat menjadi penyebab dalam fenomena PT Asuransi Jiwasraya Tbk karena kurangnya pengawasan manajemen sehingga dapat menurunkan kinerja perusahaan dan integritas laporan keuangan menjadi menurun. PT Asuransi Jiwasraya Tbk perlu memperhatikan nilai total aset agar tidak terlalu *overstated* maupun *understated* karena dengan besarnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset akan semakin banyak informasi yang tersedia bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi.

Salah satu yang dapat mempengaruhi faktor integritas laporan keuangan yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang dilakukan antara sebuah akuntan publik atau kantor akuntan publik dengan kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan (Santia, 2019). Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat 1 dan 4 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Pembatasan untuk jasa audit hanya berlaku untuk akuntan publik saja sedangkan untuk KAP sudah tidak dibatasi masa pemberian jasanya. Akuntan publik dan KAP dapat menerima penugasan umum kembali untuk klien jika jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut tidak diberikan setelah 1 (satu) tahun buku. Hubungan *audit tenure* terhadap integritas laporan keuangan adalah dengan

panjangnya masa perikatan audit maka auditor dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan menjaga independensi dalam melakukan audit atas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan hasil yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prananti (2018), Sari & Hapsari, (2018) dan Amrulloh *et al.*, (2016) hasil penelitian ini menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Qoyyimah *et al.*, (2015), Safitri (2019), dan Dewi *et al.*, (2019) menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan karena semakin lama masa kerja auditor dengan klien, menandakan semakin rendah integritas laporannya, sehingga dapat independensi auditor dapat menurun.

Kepemilikan institusional juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Menurut Permasari (2010) dalam (Fransiska *et al.*, 2016) kepemilikan insititusional adalah kepemilikan atas saham suatu perusahaan oleh institusi lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya. Keberadaan kepemilikan institusional memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen karena pengawasan dapat dilakukan dengan lebih optimal, sehingga dapat menjamin para pemegang saham. Selain itu, kepemilikan institusional juga dapat berperan penting dalam agen pengawasan yang ditekan oleh besarnya investasi mereka di pasar modal. Hubungan kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan adalah kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam pengawasan manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh instusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga integritas laporan keuangan terjaga dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi *et al.*, (2019), Hoesada & Pradika (2019), Savitri (2016), dan Fajaryani (2015) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan yang berarti bahwa kepemilikan institusional berperan penting pada proses pelaporan keuangan untuk mengawasi perilaku manajer dan bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh Arista *et al.*, (2018), Prananti (2018), Akram *et al.*, (2018), Nurdiniah & Pradika (2017), dan Saksakotama & Cahyonowati (2014) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan karena banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak institusi yang memiliki peran di luar manajemen perusahaan, sehingga proses monitoring menjadi lebih sulit dan dapat menyebabkan kurangnya penerapan integritas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan sebuah badan beranggota dalam perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris yang independen di luar perusahaan dan bertugas untuk memberikan nilai atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan agar pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait komisaris independen memiliki perlindungan (Arista *et al.*, 2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa dewan komisaris berperan sebagai pengawas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, dan memberi nasihat kepada direksi. Jika perusahaan memiliki komisaris independen, terdapat badan-badan yang mengawasi dan melindungi hak untuk pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, sehingga laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen akan cenderung berintegritas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Arista *et al.*, 2018) Nurdiniah & Pradika (2017), Savitri (2016), dan Hasanuddin (2015) bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Qoyyimah *et al.*, (2015), Amrulloh *et al.*, (2016), Hoesada & Pradika (2019), dan Prananti (2018) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan karena berapapun jumlah proporsi dewan komisaris independen, integritas laporan keuangan tidak dapat dipengaruhi.

Besar kecilnya suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Menurut Nurdiniah & Pradika (2017), ukuran perusahaan adalah suatu ukuran sebuah perusahaan yang dapat ditentukan dari total aset yang dimiliki. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak informasi yang tersedia bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi saham. Perusahaan yang besar juga akan lebih diperhatikan oleh masyarakat yang menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan besar tersebut juga dapat menghadapi tuntutan transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Akram *et al.*, (2018), Nurdiniah & Pradika (2017), Hasanuddin (2015), Fajaryani (2015), dan Saksakotama & Cahyonowati (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Hoesada & Pradika (2019) dan Juliana (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan karena besarnya ukuran perusahaan bukan berarti perusahaan semakin konservatif dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga masih diperlukannya penelitian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Audit Tenure, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Sub Sektor Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2019)”**

1.3 Perumusan Masalah

Laporan keuangan merupakan catatan informasi laporan keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Laporan keuangan juga berperan sebagai bentuk

pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu kepada para *stakeholder*, sehingga laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam menyajikan laporan keuangan banyak terjadi kasus-kasus perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesungguhnya atau memanipulasi agar laporan keuangan terlihat baik dihadapan investor dan kreditor. Dengan tidak menyajikan ketidakjujuran dalam menyajikan laporan keuangan menyebabkan menurunnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan dan berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Faktor yang ingin penulis kaji lebih lanjut yaitu *audit tenure*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan berikut masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana *audit tenure*, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan dan integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019?
2. Apakah *audit tenure*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019?

5. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh *audit tenure*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan bagi akademisi yang membaca sehingga dapat menjadi referensi dalam pemahaman ilmu yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya dan pengetahuan mengenai integritas laporan keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan, serta perusahaan agar lebih kompeten lagi dalam menyajikan integritas laporan keuangan.
2. Bagi akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam melakukan kegiatan audit menilai dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan klien.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pertimbangan yang relevan berkaitan dengan keputusan investasi di perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimuali dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.